AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Google Scholar, dan Base.

STRATEGI MEMBANGUN KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA KEPOLISIAN MELALUI PENDEKATAN SOSIO INSTITUSIONAL KOMPERATIF

Muhtadin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
kangmuhtaadin85@gmail.com

Abstract

The police need the public's trust to do their job well. Recognizing this, police organizations across Europe are applying a variety of methods to gain trust or trust-building strategies. In its implementation, trust in the police and the legitimacy of the police pay less attention to what the police do to increase trust. In this regard the author will outline an approach to understanding strategies for building police trust in their social and institutional contexts by applying a comparative and dynamic perspective. Illustrating the value of a socio-institutional approach to trust-building strategies, each of these phases is discussed in the context of a comparative and dynamic study of police trust building strategies in England and Wales, Denmark, and the Netherlands. It is said that a more sophisticated understanding of building trust in its social and institutional context not only tells us something about the police, but also helps us understand how state institutions shape and maintain their position in the complex environment of our changing society.

Keywords: *Police Agency, Socio-Institutional Comparative, Police*

Abstrak : Polisi membutuhkan kepercayaan publik untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Menyadari hal ini, organisasi kepolisian di seluruh Eropa menerapkan berbagai metode untuk mendapatkan kepercayaan atau strategi membangun kepercayaan. Pada implementasinya, kepercayaan terhadap polisi dan legitimasi polisi kurang memperhatikan apa yang sebenarnya dilakukan polisi untuk meningkatkan kepercayaan. Dalam hal ini penulis akan menguraikan pendekatan untuk memahami strategi dalam membangun kepercayaan polisi dalam konteks sosial dan kelembagaan mereka dengan menerapkan perspektif komparatif dan dinamis. Mengilustrasikan nilai pendekatan sosio-institusional terhadap strategi membangun kepercayaan, masing-masing fase ini dibahas dalam konteks studi komparatif dan dinamis tentang strategi pembangunan kepercayaan polisi di Inggris dan Wales, Denmark, dan Belanda. Dikatakan bahwa pemahaman yang lebih canggih tentang membangun kepercayaan dalam konteks sosial dan kelembagaannya tidak hanya memberi tahu kita sesuatu tentang polisi, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana lembaga negara membentuk dan mempertahankan posisi mereka di lingkungan kompleks masyarakat kita yang berubah.

Kata Kunci: Lembaga Kepolisian, Sosio Institusional Komperatif, Polisi

Jurnal AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Polisi diyakini tidak diragukan lagi kepercayaannya. Polisi dulu dipandang sebagai institusi yang sakral. Mereka dianggap sebagai titik pijakan bagi masyarakat, lembaga kepolisian dianggap membawa stabilitas, ketertiban, dan rasa bersama tentang benar dan salah (Reiner, 2013). Selama beberapa dekade terakhir, legitimasi polisi terus menurun karena birokrasi yang stagnan, meningkatnya permintaan publik untuk perubahan, dan meningkatnya kritik terhadap konservatisme. Hal ini dikatakan telah berkontribusi pada penurunan legitimasi polisi dan statusnya yang "suci" di masyarakat luas. Menurut (Jackson et al., 2012), organisasi kepolisian telah menjadi "dilegitimasi tetapi dideskralisasi" karena publik tidak lagi menerima otoritas mereka. Akibatnya, polisi perlu fokus terutama pada cara-cara pragmatis untuk mempengaruhi opini public.

Sistem kepolisian di banyak negara sedang kacau. Skandal, kampanye media, kemajuan organisasi dan tren sosial baru-baru ini telah menyebabkan siklus reformasi berkelanjutan di banyak negara Barat. Hal ini karena tuntutan publik akan akuntabilitas dan transparansi masalah hak asasi manusia (Savage & Burrows, 2007; Terpstra & Trommel, 2009). Selain itu, orang menghargai pendekatan pragmatis terhadap kehidupan. Keadaan yang disebut Brodeur sebagai revolusi abadi adalah transformasi berkelanjutan yang mencakup banyak aktor, pemangku kepentingan, bidang kepentingan, dan kondisi lokal (seperti cuaca). Hal ini ditunjukkan dalam esai Punch sebagai pusaran melingkar kuat yang terus berubah. Dengan keadaan yang terus berubah, penegakan hukum perlu menjaga kepercayaan dan persetujuan publik. Bagaimana mereka bisa mencapai ini dengan kondisi saat ini? Polisi membutuhkan kepercayaan publik untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika orang percaya bahwa polisi dapat dipercaya, mereka dapat menangani tugas mereka secara lebih efisien dan efektif (Jackson et al., 2012). Selain itu, warga merasa lebih aman ketika polisi dipercaya (Skogan, 2009). Karena polisi menegakkan otoritas negara, kepercayaan pada mereka menunjukkan legitimasi negara secara keseluruhan. Inilah mengapa sangat penting bagi polisi untuk dilegitimasi kembali dengan mencapai kepercayaan publik (Reiner, 2013).

Menciptakan kepercayaan publik di departemen kepolisian membutuhkan perubahan praktik dan institusi mereka. Goldsmith (2005) menguraikan banyak cara hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan strategi membangun kepercayaan. Ketidakpercayaan dapat dilawan dengan merancang strategi membangun kepercayaan.

Strategi-strategi ini mempromosikan legitimasi dan kepercayaan bukan ketidakpercayaan—dengan menciptakan perilaku positif yang menghasilkan lebih banyak perilaku positif. Misalnya, Gambetta menyatakan bahwa ketidakpercayaan memupuk perilaku mengalahkan diri sendiri (1988). Suchman juga percaya bahwa ketidakpercayaan mempertahankan legitimasi melalui penciptaan siklus yang tidak sehat (1995). Ada sejumlah pertanyaan mengenai definisi 'kepercayaan' ketika mengembangkan strategi ini. Misalnya, siapa yang dirujuk ketika istilah seperti kepercayaan, legitimasi, atau kepuasan digunakan? Apakah hanya masyarakat umum? Konsep relevan lainnya termasuk kepercayaan, legitimasi, dan kepuasan. Beberapa pertanyaan lain berhubungan dengan hubungan antara karya bergambar dan retoris dan praktik substantif. Bagaimana seseorang melakukan pekerjaan retoris dan bergambar secara berbeda dari praktik substantif? Selain itu, bagaimana seseorang menjelaskan perbedaan budaya dan perbedaan bahasa dalam konteks internasional? Strategi membangun kepercayaan dapat berupa apa saja yang dipandang cocok oleh individu selama hal itu secara alami bergantung pada subjektifisme. Akibatnya, pemahaman saya tentang strategi membangun kepercayaan fleksibel dan terbuka. Polisi memiliki banyak inisiatif pembangunan kepercayaan yang diterapkan di banyak negara. Hal ini karena mereka menyadari bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih dari strategi mereka. Istilah yang lebih populer dalam penelitian administrasi dan manajemen publik adalah studi tentang strategi membangun kepercayaan, yang dapat membantu kita memahami hubungan antara polisi dan public (Crank & Langworthy, 1992).

Pemahaman tentang pendekatan ini telah terbukti kebenarannya sejak awal. Sebagian besar penelitian di Barat berfokus pada bagaimana warga memandang polisi. Memahami kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan institusi yang efektif. Namun, sebagian besar studi tentang kepercayaan publik pada polisi gagal mempertimbangkan dengan tepat sifat kepercayaan publik yang terus berubah. Sebaliknya, mereka memperlakukan kepercayaan publik sebagai hal yang konstan dan tidak dapat dihindari. Selain itu, banyak yang fokus pada strategi polisi tanpa mempertimbangkan aspek kelembagaan dan sosial dari kepercayaan. Bahkan, beberapa bahkan fokus pada studi quasievalsual yang meneliti efek dari kebijakan atau intervensi tertentu. Studi-studi ini seringkali relevan terlepas dari biasnya yang jelas karena mereka memeriksa bagaimana perilaku membangun kepercayaan memengaruhi orang (Jackson et al., 2012; Lee & McGovern, 2013). Institusionalisme baru adalah aliran pemikiran yang

berkaitan dengan sosiologi yang menyatakan bahwa institusi memiliki kekuasaan yang signifikan atas manusia. Saya menggunakan informasi ini untuk membuat teori saya sendiri tentang strategi membangun kepercayaan polisi. Pekerjaan saya termasuk menyoroti pentingnya penelitian polisi, teori yang diilhami oleh kepercayaan sosiologis dan pola pikir yang dilembagakan. Dengan menggabungkan gagasan-gagasan tersebut, kelemahan dari tradisi intelektual yang terpisah terbukti berhasil.

Banyak tulisan tentang kepercayaan dan ilmu kepolisian berjuang untuk merepresentasikan lingkungan institusional strategi kepolisian dengan tepat. Institusionalisme baru malah menekankan konvergensi dan stabilitas atas perubahan dan dinamika. Hal ini dikarenakan fokusnya pada lingkungan kelembagaan seringkali membayangi faktor sosial berbasis warga negara dalam menentukan strategi (Marcelo et al., 2009). Makalah penelitian ini didasarkan pada temuan Ph.D (H. Schaap & de Bruijn, 2018). Selama proses membangun kepercayaan, banyak orang menghadapi pergumulan seperti kehilangan pasangan atau anak. Kesulitan ini mengharuskan orang untuk memeriksa masalah mereka dan menciptakan solusi. Inilah sebabnya mengapa beberapa fase membangun kepercayaan berfokus pada pembuatan dan penerapan strategi di Denmark, Inggris, Wales, dan Belanda sebagai gambaran masing-masing negara yang akan fokus pada satu fase proses sebagai ilustrasi tentang bagaimana setiap langkah dalam pembentukan strategi untuk membangun kepercayaan tentunya membutuhkan perencanaan yang cermat karena setiap langkah harus diatur waktunya dengan benar sesuai dengan pengaturan institusi kelembagaan.

METODE

Tiga negara Eropa dipilih untuk menganalisis undang-undang negara bagian dan metode polisi untuk membangun kepercayaan publik. Negara-negara tersebut adalah Belanda, Denmark dan Wales. Meskipun dekat satu sama lain dalam geografi dan budaya, mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang peran negara dalam kehidupan mereka. Saya mengumpulkan data dari wawancara dengan 23 informan di Inggris selama Oktober 2014. Saya juga mewawancarai 31 informan di Denmark selama Januari hingga Februari 2015 dan 22 informan di Belanda antara Juli 2014 dan September 2015. Negara pilihan saya berikutnya adalah Inggris dan Wales , dimana saya melakukan kerja lapangan antara Juni dan Agustus 2015. Selama ini, saya mewawancarai lebih dari 23 informan. Penelitian saya

meluas ke isu-isu terkait kepercayaan lainnya di setiap negara seperti pembangunan kepercayaan, fungsi negara, dan institusi yang ada. Wawancara dilakukan pada dua tingkatan yang berbeda; lokal dan nasional. Wawancara lokal berfokus pada informasi yang lebih detail tentang tren, kebijakan, dan perubahan di seluruh dunia. Wawancara nasional berusaha untuk memahami upaya membangun kepercayaan masa lalu dan tren saat ini. Wawancara ini diterjemahkan oleh peneliti untuk dilakukan dalam bahasa Belanda. Saya melakukan wawancara di berbagai lokasi di seluruh dunia, beberapa terkait dengan kepadatan penduduk yang berbeda dan lainnya terkait dengan wilayah metropolitan atau pedesaan negara tersebut. Saya ingin menyoroti variasi di setiap negara dan meneliti bagaimana keputusan politik nasional memengaruhi kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan sosio-institusional

Seperti yang dikatakan seorang pengamat beberapa dekade yang lalu, "polisi sendiri adalah aktor terpenting dalam menentukan sikap publik" (Gourley, 2015). Ini karena legitimasi sosial (Terpstra & Trommel, 2009; Tyler & Wakslak, 2004), termasuk kepercayaan, memiliki "karakter percakapan" . Di dalamnya terkandung klaim otoritas atas legitimasi dan bagaimana "audiens" – publik – menganugerahkan legitimasi atas otoritas tersebut (dalam hal ini polisi). Bergantung pada tanggapan audiens, seperti tingkat kepercayaan, pihak berwenang dapat menyesuaikan klaim mereka, terutama melalui strategi membangun kepercayaan tertentu. Dengan demikian, kedua belah pihak berinteraksi secara dinamis. Seperti dalam percakapan nyata, penting untuk dicatat bahwa pihak yang berbeda memiliki sudut pandang mereka sendiri dan mengikuti logika mereka sendiri Departemen kepolisian menggunakan strategi yang bergantung pada konteks untuk membangun kepercayaan dengan publik. Strategi-strategi ini berubah berdasarkan negara, institusi, dan budaya. Selain itu, sangat sedikit departemen kepolisian yang pernah mempelajari bagaimana strategi membangun kepercayaan berubah dari waktu ke waktu atau di negara lain. Sebaliknya, polisi paling sering berfokus pada studi dinamis dan komparatif tentang strategi mereka di berbagai negara (de Maillard et al., 2018).

Berbagai strategi harus diperiksa dalam sifatnya yang bergantung pada konteks. Perlu diingat juga bahwa membangun kepercayaan adalah proses dinamis yang berubah dengan setiap konteks baru. Menciptakan, mengadopsi, dan menciptakan keturunan

membutuhkan waktu lama dan membutuhkan banyak elemen untuk bersatu (Kingdon & Knight, 2007). Pemahaman yang efektif tentang kepercayaan polisi berasal dari mempelajari berbagai perspektif di seluruh negeri. Ini termasuk mempertimbangkan bagaimana upaya masa lalu untuk membangun kepercayaan antara lembaga penegak hukum berhasil. Dengan pemikiran ini, kita harus mempertimbangkan bagaimana kerangka teoretis dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Meyer dan Rowan mempelajari hubungan antara legitimasi dan konteks sosial. Mereka menemukan bahwa legitimasi paling menonjol dalam konteks organisasi dan kelembagaan. Kedua konteks ini memiliki kekuatan yang lebih besar atas keseluruhan legitimasi daripada konteks sosial (Tyler & Wakslak, 2004). Namun, strategi membangun kepercayaan adalah cara penting untuk meningkatkan legitimasi di semua tingkatan. Setiap sistem kekuasaan atau otoritas membutuhkan legitimasi; tanpanya, otoritas tidak sah. Polisi perlu mempertahankan legitimasinya sebagai sebuah institusi dan perlu dianut oleh pemerintah dan lembaga lokal agar efektif (Meyer & Rowan, 1977). Konsekuensinya, mereka perlu memiliki karakter berlapis-lapis yang membuat mereka tampak dapat dipercaya oleh banyak orang. Institusi, organisasi, dan pemerintah yang berbeda dapat menggunakan berbagai strategi untuk mencapai, mempertahankan, dan bahkan meningkatkan legitimasinya. Organisasi sering menggunakan "mitos yang dirasionalisasi" sebagai sumber legitimasi. Ini adalah asumsi tentang seperti apa organisasi seharusnya dan bagaimana seharusnya berfungsi yang tidak benar secara objektif. Sebaliknya, mereka hanya diterima sebagai fakta oleh publik (Meyer & Rowan, 1977). Mitologi membantu organisasi tampak sah dengan menyediakan kerangka bagi orang-orang untuk memahami tujuan mereka (Crank & Langworthy, 1992)

Kepolisian dapat dengan mudah membangun legitimasi dan kepercayaan melalui mitos seremonial atau rasionalisasi. Misalnya, banyak orang percaya bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah untuk memberantas kejahatan secara efektif. Atau bahwa polisi terutama perlu melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan; diperlukan upaya yang besar dari polisi untuk meyakinkan orang bahwa mitos mereka sah. Pemahaman orang tentang agama berasal dari berbagai sumber. Ini dapat mencakup tren budaya saat ini, keadaan sejarah dan bahkan bahasa tertentu. Akibatnya, gagasan tentang agama berubah dengan setiap keadaan baru. Perubahan dalam praktik material dan tujuan memengaruhi upaya membangun kepercayaan. Ashforth dan Gibbs (1990) mencatat bahwa ide ini memiliki implikasi yang sangat besar ketika mempelajari strategi membangun kepercayaan lintas negara. Bekerja untuk membangun

kepercayaan dapat melibatkan perubahan substantif terhadap tujuan, proses, dan struktur organisasi. Penampilan fisik lembaga penegak hukum dapat membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan polisi. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan gambar mulai dari kampanye kehumasan hingga materi PR baru serta praktik simbolik lainnya. Mawby dan Reiner sama-sama menunjuk pada penciptaan strategi membangun kepercayaan sebagai contohnya (Jackson et al., 2012; Terpstra & Trommel, 2009).

Seperti yang dijelaskan oleh Lee pada tahun 2007, ketakutan akan kejahatan ditemukan oleh beberapa orang. Ini mirip dengan bagaimana orang memahami ketakutan akan polisi. Beberapa contoh ketika polisi diberi tahu tentang suatu masalah terjadi pada waktu tertentu, karena alasan tertentu, dan di lokasi di seluruh dunia. Menurut definisi, negara dan periode waktu tertentu mungkin memiliki pendapat berbeda tentang apakah mereka mempercayai polisi atau tidak. Menurut pengamatan Lee, ketakutan orang terhadap kejahatan ditemukan melalui rasa takut yang tak terhindarkan. Sama seperti Lee menggambarkan rasa takut akan kejahatan, kepercayaan pada sistem kepolisian dibangun melalui peristiwa pemicu tertentu dengan penyebab yang tidak dapat dijelaskan. Namun, sistem kepercayaan ini diamati di berbagai negara dan bukan di negara lain. Hal ini menjadi perhatian para pejabat di lembaga tersebut secara keseluruhan. Menurut Suchman (1995), ini berasal dari pernyataan Kingdon (1995). Prasyarat untuk membangun kepercayaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memperbaiki kepercayaan. Inilah mengapa kepercayaan pada polisi dipahami secara berbeda di berbagai negara dan dari waktu ke waktu. Ini juga menunjukkan kontinuitas dan diskontinuitas dari waktu ke waktu. Mendefinisikan masalah membantu menyelesaikannya dengan membangun kepercayaan, yang penting karena berasal dari banyak strategi yang dapat dikonfigurasi ulang dan didefinisikan ulang.

Polisi perlu membangun kepercayaan dan legitimasi ketika mereka mengadopsi kepercayaan seremonial. Ini karena mitos rasional apa pun yang mereka buat tidak sulit ditemukan. Misalnya, banyak departemen kepolisian mengklaim bahwa tugas utama mereka adalah mengalahkan kejahatan dan mencegahnya terjadi. Ide-ide ini sulit untuk ditinggalkan oleh polisi meskipun faktanya membutuhkan banyak usaha. Segudang faktor menentukan definisi mitos yang diterima. Ini termasuk lokasi historis, linguistik, dan geografis suatu budaya. Mereka juga termasuk struktur kelembagaan hadir dalam budaya tertentu. Karena keadaan ini, cara budaya mendefinisikan dirinya menentukan bagaimana membangun organisasi dan menjalankannya. Bahkan dapat menentukan legitimasi yang dirasakan dari

suatu organisasi, atau keberadaannya dalam beberapa kasus. Ini memiliki implikasi besar ketika mempelajari strategi membangun kepercayaan internasional. Kepercayaan dapat dipupuk dengan beberapa cara berbeda. Beberapa dari metode ini melibatkan perubahan material pada praktik dan tujuan organisasi. Ini disebut sebagai manajemen substantif. Metode lain melibatkan perubahan simbolik yang diterapkan orang dalam strategi presentasi mereka (Terpstra & Trommel, 2009). Membuat kampanye PR baru bukanlah satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan. Banyak strategi membangun kepercayaan menggabungkan elemen simbolis dan substantif. Proses ini melibatkan pembentukan tiga tahap pembangunan kepercayaan: pengenalan masalah, pembuatan strategi, dan adopsi strategi. Seperti Lee, gagasan bahwa kepercayaan pada polisi diperlukan pada awalnya merupakan penemuan. Ini mirip dengan bagaimana Lee merasa ketakutan akan kejahatan ditemukan olehnya. Seperti halnya kepercayaan pada polisi, hal ini menjadi sorotan dalam agenda masyarakat. Polisi membutuhkan kepercayaan untuk dibangun; memperbaiki atau memelihara; dan untuk beberapa alasan selalu dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Ini adalah masalah kebijakan publik, sebagaimana dicatat oleh Kingdon pada tahun 1995. Konsekuensinya, kita harus mendefinisikan kebijakan publik dalam skala yang lebih besar. Suchman (1995) menyatakan bahwa membangun kepercayaan dengan publik membutuhkan kepercayaan yang diperoleh, kepercayaan yang dipertahankan atau kebutuhan untuk memperbaikinya. Orang yang berbeda memahami kepercayaan dengan cara yang berbeda. Konsep kepercayaan terhadap polisi berbeda-beda di setiap negara dan tidak selalu sama dari waktu ke waktu (D. Schaap & Scheepers, 2014). Mendefinisikan kepercayaan membantu menentukan cara terbaik untuk memecahkan masalah karena menentukan strategi apa yang digunakan untuk membangun kepercayaan (A. Goldsmith, 2005; Kingdon & Knight, 2007).

Pakar kebijakan dapat membuat langkah-langkah baru untuk memecahkan masalah dengan mempromosikan keyakinan pribadi mereka tentang hubungan antara masyarakat dan penegak hukum. Hal ini dapat mengarah pada promosi strategi membangun kepercayaan, seringkali didasarkan pada gagasan yang tidak akurat tentang penegakan hukum dan publik. Polisi juga dapat meminta masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan warga negara untuk langkah-langkah membangun kepercayaan. Terlepas dari upaya para pengunjuk rasa, polisi mempertahankan kebebasan untuk menyusun strategi mereka sendiri untuk membangun kepercayaan. Langkah-langkah membangun kepercayaan umum mencakup prosedur yang berubah seiring waktu dan kesinambungan kelembagaan.

Perubahan budaya menyebabkan perlunya kebijakan yang berbeda untuk menangani masalah kepercayaan. Mitos yang saling bertentangan menyebabkan berbagai pendekatan untuk masalah kepercayaan. Persepsi publik dapat berubah secara tiba-tiba dan sangat berdampak pada penegakan hukum. Ini terutama benar ketika orang dihadapkan pada skandal atau krisis. Kebijakan terbuka menciptakan "jendela kebijakan" yang memberikan peluang untuk perubahan sistemik. Pergeseran gagasan tentang kepercayaan dan kerja sama membutuhkan sistem baru untuk menggantikan yang lama dan menciptakan ideologi baru. Tugas ini membutuhkan restrukturisasi institusional yang signifikan, yang mendelegitimasi ide dan mitos lama. Ideologi baru membutuhkan sistem pendukung mereka sendiri sebelum menjadi populer. Crank dan Langworthy 1992 menyatakan bahwa reformasi kepolisian seringkali tidak menggunakan data empiris atau hasil tes. Alih-alih, ia menggunakan praktik seperti membangun kepercayaan melalui konflik alih-alih mereformasi diri melalui "efektivitas teknis". Paradigma baru membangun kepercayaan ini dapat menyebabkan gesekan dan konflik yang signifikan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam pergeseran tersebut. Sifat terdesentralisasi dari sistem politik menciptakan hasil yang tidak dapat diprediksi dalam cara mereka berinteraksi, bernegosiasi, dan berkonflik satu sama lain. Orang sering memainkan peran tak terduga dalam mitos atau bingkai dengan memanfaatkan cerita ini untuk keuntungan mereka. Misalnya, tujuan politik yang terdefinisi dengan baik seperti menurunkan tarif pajak dapat menghasilkan organisasi yang kompleks dengan banyak kepentingan yang bersaing, banyak tekanan pada satu keputusan, dan peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Orang yang bepergian antar negara mengharapkan atau mengklaim ide dan strategi bersifat universal. Namun, negara yang berbeda menerapkan prosedur keamanan yang berbeda yang menciptakan perbedaan yang signifikan. Banyak pelancong masih menggunakan slogan dan ide dari waktu dan tempat yang berbeda tetapi tidak ada yang mengklaim bahwa slogan dan ide tersebut benar-benar universal.

Tabel 1. membangun kepercayaan yang komplek.

Proses:	factor- factor yang menentukan proses:	konteks, Peristiwa, dan agensi,
Pengenalan masalah	Pemahaman konseptual tentang kepercayaan Diagnosis masalah	Bahasa dan budaya Ketajaman masalah atau krisis
Generasi strategi	Mitos rasionalisasi yang dominan Actor utama yang terlibat	Pengaruh dari negara atau aktor lain Idiologi dan politik (tidak terduga) acara dan terbuka
Adopsi strategi	Factor-faktor yang merangsang strategis Factor-faktor yang menghambat strategi Factor-faktor yang mengubah strategi	Situasi preferensi adalah kuci Individu/actor dukungan polisi Aspek historis dan struktural

Kesalahpahaman publik tentang konteks budaya membatasi solusi yang dirasakan untuk masalah. Ide dan konsep yang lebih akurat seringkali membutuhkan adaptasi budaya. Beberapa strategi menjadi lebih layak tergantung pada konteksnya. Hal ini terutama berlaku untuk kebijakan kepolisian tanpa toleransi dari New York City ke Belanda dan Inggris. Pemolisian tanpa toleransi diciptakan oleh penduduk asli Amerika. Namun, banyak negara menerapkan versi mereka sendiri dari strategi ini. Ini termasuk Belanda dan Inggris. Kedua negara ini menggunakan pendekatan penegakan hukum yang lebih agresif yang lebih berfokus pada tanda-tanda gangguan kecil. Mereka juga mengandalkan metode yang dipimpin informasi alih-alih mantra keras untuk kejahatan. Meskipun memiliki nama yang sama, versi pemolisian tanpa toleransi masing-masing negara berbeda secara signifikan satu sama lain. Orientasi profesional dan nilai budaya yang berbeda antar negara dapat menyebabkan masalah pada agregasi data. Ini karena banyaknya proyek yang mempelajari teknik membangun kepercayaan di berbagai negara. Perbedaan ini menyebabkan interpretasi yang berbeda dari teknik ini dan efeknya. Selain itu, negara yang berbeda sering kali menggunakan teknik yang berbeda yang mengharuskan perlunya perbandingan data (de Maillard et al., 2018). Perubahan belajar datang dari informasi baru dan ide-ide baru yang datang dari luar kelas. Selain kebijakan itu sendiri, sistem sekolah juga mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti konteks, peristiwa, dan agensi saat membuat kebijakan.

Analisis

Strategi di sini mengeksplorasi pembangunan kepercayaan di masing-masing dari tiga negara. Bagian di bawah menampilkan tahapan proses di setiap negara, dengan fokus khusus pada penyusunan rencana atau penerapannya. Proyek ini mengacu pada pengalaman puluhan tahun bekerja dengan kepercayaan di antara ketiga negara. Kasus Inggris dan

Wales terbukti menantang karena usianya; itu membutuhkan beberapa dekade untuk menciptakan kembali fase awalnya. Dalam pilihan contoh terbaru saya, saya menunjukkan bagaimana generasi dan adopsi memengaruhi pembangunan kepercayaan. Fase pertama dan kedua dari ide ini akan tampak relevan karena membantu menunjukkan sifat agensi, konteks, dan peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Namun, pilihan saya berfokus pada satu tahap tertentu daripada dua tahap lainnya. Pilihan ini praktis karena menunjukkan pelajaran tentang membangun kepercayaan dalam konteks terkini. Ada banyak jenis upaya membangun kepercayaan di Amerika Serikat. Beberapa di antaranya ditunjukkan dalam kumpulan data ini dari Schaap (2018). Banyak peristiwa telah membentuk gerakan untuk mengenali penyakit mental sebagai masalah. Ini termasuk kerusuhan Brixton, laporan Scarman, dan Menteri Dalam Negeri yang rentan. Kasus pertama akan menunjukkan bahwa siklus pembangunan kepercayaan telah terjadi berulang kali—sering kali terpisah bertahun-tahun—dalam konteks yang berbeda. Hal ini karena peristiwa-peristiwa berbeda yang tampaknya tidak terkait sering kali muncul bersamaan untuk menciptakan persepsi tentang suatu masalah.

Polisi memiliki nilai signifikan yang melekat pada mempertahankan lapisan persetujuan publik. Ini karena orang-orang menganggap keberhasilan menyanggah persetujuan sebagai pencapaian besar. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, ini terjadi di Inggris pascaperang. Orang-orang mulai membayangkan polisi sebagai organisasi yang pada dasarnya baik, meskipun sifatnya berbahaya. Akibatnya, masyarakat melihat polisi sebagai institusi yang sakral. Kapan orang pertama kali mulai saling percaya? Sulit untuk mengingat momen yang tepat ini, tetapi beberapa mungkin mengalami kesulitan memikirkan cara memperbaiki kepercayaan antara publik dan departemen kepolisian. Pada tahun 1958, kepolisian dianggap sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan sedikit pengawasan dan hampir tanpa pertanggungjawaban, lembaga penegak hukum diberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas. Situasi paradoks ini sangat umum dan bertahan hingga hari ini. Pada 1970-an dan 1980-an, ketegangan yang meningkat antar komunitas menyebabkan serangkaian kerusuhan di kota-kota dalam London. Salah satunya adalah Kerusuhan Brixton pada tahun 1981. Perubahan masyarakat selama tahun 1960-an dan 1970-an membuat pekerjaan polisi menjadi lebih sulit; tetapi ini tidak segera menjadi masalah bagi penegakan hukum. Setelah sekelompok pemuda kulit hitam menghabiskan beberapa hari berhadapan dengan penegak hukum, kerusuhan Brixton menarik perhatian publik. Lord Scarman melakukan penyelidikan setelah kerusuhan untuk menentukan

penyebabnya. Scarman melaporkan bahwa dia yakin bahwa kepercayaan publik yang hilang oleh sebagian besar masyarakat menyebabkan pemuda kulit hitam memiliki opini negatif terhadap polisi. Sementara tidak semua bagian dari publik kehilangan kepercayaan, sebagian besar mengalaminya (A. J. Goldsmith, 1991).

Diagnosis Scarman tentang masalah kepercayaan dibagikan oleh sedikit orang, tetapi laporannya tentang hal itu menghadirkan "krisis kepercayaan" di antara polisi. Benyon menyatakan bahwa perkembangan ini merupakan yang paling meresahkan bagi penegakan hukum saat itu dalam bukunya 1984, hlm. 237. Selain itu, data survei menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum setempat dibandingkan saat ini. Sebagaimana dicatat oleh Brogden 1982, halaman v, "kerusuhan membantu polisi menjaga kepercayaan publik." Karena itu, pemberontakan cenderung mengejutkan komunitas penegak hukum dan berfungsi sebagai alat yang berguna untuk tujuan mereka. Setelah laporan Scarman dirilis, Leon Brittan, menteri dalam negeri yang baru, menggunakan konsep kepercayaan publik dalam kebijakannya. Bottomley, Faulkner, dan lainnya menjelaskan bahwa dia menerapkan kepercayaan dalam pembuatan kebijakan tidak lama setelah pengangkatannya. British Crime Survey II bertanya kepada peserta tentang kepercayaan mereka pada polisi pada tahun 1984. Sejak itu, indikator ini dimasukkan dalam survei setiap kali dijalankan. Brittan menjabat sebagai menteri dalam negeri hanya selama 2 1/2 tahun; dari Juni 1983 hingga September 1985. Namun demikian, ia memainkan peran penting dalam mendukung agenda kebijakan selama masa jabatannya. Seorang mantan pegawai pemerintah mencatat bahwa membahas kepercayaan publik adalah salah satu topiknya. Dia bekerja di Home Office dan sebagai Elder & Willing. Karena dia adalah orang pertama yang berbicara tentang meningkatkan kepercayaan publik terhadap idenya. Kapan dan mengapa Menteri Dalam Negeri Brittan membuat konsep ini? Seorang mantan pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa temuan laporan Scarman mendorongnya untuk meraih kesuksesan. Namun, motivasinya bersifat pribadi maupun profesional. E&W: Leon Brittan meremehkan kekuatan yang dimiliki Willie Whitelaw sebagai penasihat Perdana Menteri yang paling berkuasa. Ini menyebabkan komplikasi untuk posisi Home Office-nya. Leon Brittan tidak memiliki siapa pun untuk ditakuti sebagai karakter yang mapan. Dia adalah Kepala Sekretaris Kementerian Keuangan, tetapi belum menjadi menteri kabinet departemen. Yudaismenya memberinya kebencian anti-Semit. Afiliasi partainya lemah; dia juga berada di tepi luar spektrum politik. Pensiun dari Kemendagri. Karena dia perlu

bekerja keras untuk menjaga kredibilitas dan posisinya di dalam partai, saya yakin dia memandang kepercayaan publik sebagai tujuan yang ingin dia capai. Inilah mengapa menciptakan kepercayaan publik adalah sesuatu yang menarik baginya dari perspektif politik.

Kombinasi faktor yang bertabrakan satu sama lain diperlukan untuk merekonstruksi proses ini setelah beberapa dekade berlalu. Ini termasuk perhatian laporan Scarman terhadap kerusuhan dan polisi kepercayaannya bertanggung jawab atas persetujuan publik, serta pemahaman Menteri Dalam Negeri Wilfred Scarman tentang kepercayaan publik terhadap polisi. Karena itu, masalah kepercayaan antara polisi dan masyarakat kemungkinan akan terus berlanjut. Namun, menciptakan solusi untuk masalah ini terbukti sulit karena beberapa alasan lain. Salah satunya karena rekomendasi Lord Scarman tidak memberikan arahan yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Juga, beberapa idenya membutuhkan kolaborasi dari sumber yang tidak terduga. Ini karena dia yakin ide orang dibentuk oleh kepercayaan mereka pada polisi. termasuk reformasi proses pengaduan polisi dan pembuatan platform komunitas. Undang-Undang Polisi dan Bukti Kriminal tahun 1984 menyatukan Mogok Penambang dan eksperimen pemolisian komunitas lainnya. Setelah itu, pensiunan polisi 1 dan 2 Wawancara, E&W berbagi cerita mereka tentang eksperimen pemolisian masyarakat. Namun, momentum ini segera terhenti oleh tantangan sosial yang jauh lebih besar pemogokan para penambang. Seorang mantan kepala polisi menjelaskan bahwa Miner's Strike mengalihkan pasukannya dari reformasi. Dia menyatakan: E&W: Alasan mereka tidak melakukan reformasi adalah karena Pemogokan Penambang, yang berlangsung selama 18 bulan kekacauan. Mereka harus mengirim berton-ton petugas mereka ke Nottinghamshire untuk menjaga ketertiban. Sebagian besar petugas polisi bekerja 12 jam sehari hanya untuk menahan mereka di jalanan. Secara keseluruhan, ada konsep kepercayaan yang jelas. Ini dianggap sebagai krisis pada saat itu. Keyakinan mampu naik ke puncak kebijakan dan agenda profesional karena besarnya krisis, peran pemain kunci, pertama Lord Scarman dan kemudian Sekretaris Rumah Brittain, dan fakta bahwa polisi Inggris secara historis membanggakan diri. kepercayaan diri mereka tempat pertama. hubungan dengan publik. Namun, jendela kebijakan yang dibuka Kembali dan ditutup kembali. Setelah berhasil mendefinisikan kepercayaan pada polisi sebagai sebuah isu, proses pengembangan dan penerapan strategi tersebut dengan sangat berbeda terhenti sejak awal oleh krisis baru yang mengalihkan banyak sumber daya polisi dan pemerintah: Pemogokan penambang. Gagasan membangun kepercayaan tentang peningkatan keadilan dalam

pemolisian dan pemolisian yang berdekatan akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali tempatnya dalam agenda (yang pertama dalam laporan Macpherson (1999) dan yang terakhir dengan munculnya pemolisian meringkik pada awal 2000-an). Denmark perlu membangun kembali kepercayaan setelah mereformasi pemerintahan mereka dengan susah payah.

Untuk membantu mendemonstrasikan bagaimana polisi mengembangkan rencana baru, kami melompati ruang dan waktu. Perombakan sistem kepolisian Denmark terjadi pada tahun 2007 di bawah arahan banyak negara lain. Hasil yang diinginkan dari upaya ini adalah menggunakan dolar pajak untuk menyewa layanan penegakan hukum terbaik dengan harga terendah. Karena polisi dipandang sebagai bisnis, meningkatkan kepercayaan publik harus menjadi tujuan mereformasi operasi mereka. Ini disarankan oleh komite pejabat polisi yang direformasi dalam wawancara Visionudvalget 2005. Selain itu, mereka percaya bahwa warga ingin polisi menghentikan kejahatan dengan lebih efektif.

Ketika reformasi diberlakukan, hal itu meningkatkan kekuasaan komisaris atas bupati dengan menambah jumlah polisi distrik dari 54 menjadi 12. Hal ini memungkinkan otoritas lokal untuk menangani kegiatan kriminal yang serius dan terorganisir dengan lebih efektif. Selain itu, menurunkan waktu respons dan meningkatkan tingkat izin juga dianjurkan (Holmberg 2014). Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi, polisi menegakkan tujuan instrumental. Mereka menggunakan kerangka manajemen kinerja yang membandingkan banyak kriteria dengan visi mereka. Proses reformasi menyebabkan kebingungan organisasi yang signifikan (seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang diterbitkan oleh Balvig, Holmberg, dan lain-lain) yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sistem pengiriman polisi pusat gagal karena persiapan yang tidak memadai dan kesulitan teknis. Akibatnya, panggilan tidak terjawab dan catatan penangkapan rusak. Sebuah surat kabar nasional, Berlingske, memulai protes publik terhadap kekurangan polisi setelah menjadi sangat kritis terhadap situasi tersebut. Meskipun kepercayaan publik menurun drastis, polisi di Denmark telah pulih dari (D. Schaap & Scheepers, 2014). Perhatian utama kedua adalah bahwa proses reformasi itu sendiri memiliki aspek-aspek yang meresahkan. Polisi setempat menghadapi persepsi negatif meskipun kinerja dan kepercayaan pada mereka berangsur pulih. Selain itu, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi buruk serikat polisi lokal tetap sama. Survei dan penelitian lain menunjukkan bahwa perubahan dalam pengetahuan dan keterlibatan polisi lokal ini dicatat oleh aktor

lokal lainnya termasuk (Gourley, 2015) yang mengindikasikan perubahan ini dalam penelitian mereka.

Mengadopsi strategi Belanda: organisasi kepolisian nasional dan model layanan

Ivo Opstelten, mantan walikota Rotterdam, adalah mentor Mark Rutte, perdana menteri. Pada 2010, dia hanya menjabat sebagai satu menteri; menggabungkan banyak perubahan struktural dengan pemimpin yang kuat menghasilkan metode pembangunan kepercayaan baru yang diterapkan. Salah satu alasan utama mengapa Opstelten memutuskan untuk memasukkan banyak tujuan adalah karena dia perlu meyakinkan calon lawan dari kepolisian nasional. Masyarakat perlu lebih percaya pada polisi; ini dapat dicapai dengan menerapkan organisasi kepolisian nasional. Ini juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas publik dengan mengubah budaya polisi. Ini harus mengurangi birokrasi dan meningkatkan kedekatan lokal dengan para profesional polisi. Ide-ide ini juga disarankan agar lebih hemat biaya bagi pembayar pajak. Sistem kepolisian nasional yang baru berjanji untuk menyembuhkan trauma bangsa dengan "model layanan" membangun kepercayaan. Untuk mempromosikan kepercayaan publik dalam program baru ini, tim psikolog merekomendasikan agar penegak hukum menggunakan pendekatan baru untuk membangun kepercayaan yang disebut "model layanan" (Kort, n.d.).

Alasan di balik pendekatan ini disampaikan melalui pernyataan ini: polisi perlu menjaga reputasi mereka karena mereka sangat peduli untuk menyenangkan publik. Selain itu, dukungan publik merupakan faktor kunci dalam memenangkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, faktor paling signifikan yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap polisi adalah bagaimana perasaan anggota masyarakat umum tentang interaksi pribadi mereka dengan penegak hukum. Model layanan ini menganggap kepercayaan sebagai pola pikir tertentu. Orang percaya dengan cara tertentu, yang menghasilkan definisi baru tentang kepercayaan. Masalah dengan kepercayaan adalah memberikan layanan berkualitas. Hal ini terlihat dari penelitian (Biemolt et al. 2012). Kemajuan di bidang kepercayaan publik merupakan topik utama dalam beasiswa polisi. Salah satu teori terpenting dalam hal ini adalah keadilan prosedural, yang menyatakan bahwa interaksi dengan penegak hukum adalah kunci dalam membentuk kepercayaan publik (D. Schaap & Scheepers, 2014). Namun, aspek penegakan hukum lainnya sering diabaikan: fokus pada pelayanan dan kepuasan. NPM percaya warga negara adalah pelanggan, bukan warga negara; mereka ingin menegakkan hukum secara efisien dan menangkap penjahat. Namun, fokus mereka pada

pemberantasan kejahatan tidak sejelas fokus seputar reformasi kepolisian Denmark tahun 2007 (yang dipengaruhi oleh NPM). Polisi Belanda menggunakan pendekatan "multi-saluran" untuk memberikan kepercayaan. Ini berarti petugas berkomunikasi dengan publik melalui berbagai metode, bukan hanya satu. Petugas berharap ini mengarah pada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah daripada mengandalkan kepercayaan. Meskipun petugas mungkin tidak dapat dipercaya, mereka berharap masyarakat tetap memilih mereka ketika mereka memberikan layanan yang nyaman. Diperlukan pendekatan baru untuk merepresentasikan jarak antara dua orang. Ini disebut sebagai "kedekatan didefinisikan ulang." Ketiga, untuk sejumlah jenis kejahatan, umpan balik polisi kepada mereka yang melaporkannya menjadi wajib.

Melaporkan Kejahatan

Sebelum sistem model layanan modern diterapkan, penulis dokumen membuat daftar berbagai cara untuk melaporkan kejahatan ke polisi. Idenya adalah mengubah sistem sehingga membandingkan organisasi dan korporasi modern dengan penegakan hukum (Biemolt et al. 2012). Masyarakat percaya bahwa polisi perlu menjadi lebih sah dan dipandang sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Inilah mengapa mereka percaya masyarakat harus memiliki akses ke sistem pelaporan yang jauh dan melalui internet atau telepon. Keyakinan ini didukung oleh laporan melalui metode ini yang terdaftar sebagai pilihan utama polisi. Warga negara Belanda Utara hanya berhak atas satu tingkat layanan, yang serupa dengan yang dipikirkan oleh lembaga keuangan Rabobank. Mereka juga tidak percaya bahwa setiap orang harus menunggu satu jam untuk melaporkan kejahatan di Amsterdam. Sebaliknya, mereka dapat melaporkan kejahatan melalui telepon atau di lokasi. Tentang perbankan digital, anggota komando NL4 percaya bahwa hanya Belanda selatan yang menggunakannya. Fokusnya adalah pada isu-isu yang mempengaruhi masyarakat umum. Membuktikan legitimasi di tingkat lokal 26 kali lebih sulit daripada membuktikan legitimasi di tingkat nasional. Strategi membangun kepercayaan yang seragam adalah bagian dari dorongan keseluruhan oleh kepolisian nasional untuk memerangi kegagalan penegakan hukum. Ini karena kepolisian nasional berusaha menciptakan sistem yang lebih terpadu melalui penggunaan tingkat layanan tunggal (Schaap dan Terpstra 2018). Sebagai lokasi pusat pelaporan, kurangnya aksesibilitas kantor polisi menghambat efektivitas laporan yang dibuat dari lokasi yang jauh. Akibatnya, otoritas lokal lebih memilih untuk menyajikan pendekatan yang lebih konservatif untuk pekerjaan mereka. Hal ini terutama terjadi pada kepala tim dasar 4, NL2, yang kebetulan juga merupakan pihak pelapor warga. Akibatnya,

siapa pun yang melapor dengan cara ini harus bersepeda selama setengah jam untuk mencapai kantor polisi. Kami dapat menggunakan stasiun seluler untuk mengisi celah apa pun dalam laporan. Misalnya, jika seorang pencuri merampok seseorang dan orang tuanya tidak dapat datang ke stasiun untuk meminta pernyataan. Dengan membawa laporan ke sana, kita masih bisa merekam pernyataan dari lokasi itu.

Umpan Balik Wajib

Memastikan warga menerima umpan balik adalah bagian ketiga dari model layanan. Ini mirip dengan bagaimana bisnis komersial memberikan umpan balik kepada pelanggan mereka. Nyatanya, baik bisnis maupun kepolisian harus memberikan umpan balik atas kasus dua minggu setelah diajukan. Persyaratan ini berasal dari reformasi kepolisian nasional dan dimaksudkan untuk membantu warga memahami status kasus mereka. Komponen utama dari proses ini adalah gagasan bahwa penjahat tidak akan melihat kurangnya tindak lanjut sebagai tanda bahwa polisi tidak peduli dengan mereka. Akibatnya, persepsi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, semua kejahatan serius yang membutuhkan kepala tim dasar 2 menerimanya seperti perampokan, perampokan, penyerangan, dan kejahatan lainnya dianggap sebagai kejahatan berdampak tinggi. Orang-orang ingin umpan balik tentang laporan mereka ke polisi. Ini karena mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan laporan itu. Keyakinan pada polisi meningkat ketika korban diberitahu tentang temuan investigasi. Dengan memberi tahu mereka, petugas menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya mereka. Inilah mengapa sangat penting bahwa ini terjadi sebagai bagian dari penyelidikan sederhana. Banyak petugas polisi percaya bahwa laporan wajib adalah metode penting untuk menjaga agar warga tetap mendapat informasi. Namun demikian, banyak pejabat yang tidak setuju dengan undang-undang ini. Mereka merasa bahwa surat dan laporan standar tidak cukup untuk menggantikan laporan sukarela sepenuhnya. Banyak juga yang mengutip kekhawatiran atas kerangka target kuantitatif yang digunakan dalam implementasi undang-undang ini. Kerangka kerja ini memaksa semua petugas untuk melaporkan tindakan mereka dalam angka, dan surat standar telah menjadi format kepatuhan de facto. Pensiunan 2, NL, kepala polisi, N2: Masalah yang sedang berlangsung ini membuat pengirim mengirim email otomatis, dengan pernyataan seperti "bla bla bla", yang tidak meningkatkan kepercayaan diri saya.

Karena reformasi kepolisian nasional, Belanda dengan cepat mengembangkan strategi membangun kepercayaan bersamaan dengan peningkatan kepolisian mereka. Ini adalah perubahan pola pikir yang signifikan, karena orang sebelumnya menganggap kehadiran lokal di daerah itu lebih penting. Selain itu, hal ini dilakukan di sebagian kecil dari biaya dibandingkan dengan metode tradisional. Model pelayanan mempromosikan gagasan bahwa warga memandang polisi sebagai institusi yang sakral. Untuk mencapai status ini, model mengamanatkan bahwa petugas polisi memberikan tingkat pelayanan yang sama terlepas dari jarak geografis antara mereka dan subjeknya. Keyakinan ini memperkuat model layanan sebagai strategi membangun kepercayaan. Namun, mungkin ada kekurangan dalam menggunakan metode ini untuk membangun kepercayaan di antara populasi yang tinggal bersama. Bank modern tidak dianggap sebagai mitos yang dirasionalisasi; sebaliknya, studi kualitatif dan kuantitatif membantah gagasan tersebut. Kort dan Terpstra dari 2015 serta Boekhoorn dan Tolsma dari 2016 menantang ide populer ini (yang juga merupakan mitos). Polisi abstrak oleh Terpstra et al. 2019 sama seperti polisi Denmark setelah 2007, karena kedua entitas memiliki risiko yang serupa dengan yang dialami polisi setelah reformasi 2007. Polisi abstrak bisa jadi sulit dipahami dan dihubungkan oleh warga, menciptakan budaya ketidakpercayaan yang mirip dengan model layanan.

KESIMPULAN

Ketiga negara yang terlibat dalam proses pembangunan kepercayaan memiliki ketiga fase tersebut. Kesamaan dari upaya membangun kepercayaan ini melibatkan pembangunan jembatan antara kelas kepercayaan yang sama. Faktanya, saya terutama berfokus pada satu fase per negara dalam setiap kasus. Upaya membangun kepercayaan yang efektif menggabungkan penalaran profesional atau politik di belakangnya. Ini termasuk "mitos jatah," yang memberi tahu polisi seperti apa pekerjaan yang baik itu seharusnya (Meyer dan Rowan 1977; Crank 1994). Banyak dari upaya ini memanfaatkan jendela kebijakan—peluang untuk perubahan terorganisir yang disebabkan oleh peristiwa atau keadaan tertentu (Kingdon 1995). Selain itu, perbedaan antara strategi membangun kepercayaan ini muncul dalam jangka waktu ketika diterapkan. Konsep pengenalan masalah tertentu berbeda dalam akar penyebab dan diagnosisnya. Mitos rasional yang terdistorsi tentang seperti apa kepolisian yang baik memotivasi banyak peserta strategi. Kesenjangan ini berasal dari perbedaan budaya, waktu dan kelembagaan dalam pemahaman masing-masing budaya

tentang konsep-konsep ini. Strategi yang berbeda memiliki ide, ketegangan, dan berbagai pendapat yang berbeda di dalamnya. Beberapa orang mungkin perlu mengubah cara mereka beroperasi agar sesuai dengan lokasi mereka; yang lain mungkin melihat ketidakkonsistenan antara apa yang mereka yakini dan apa yang sebenarnya dilakukan polisi. Hal ini dapat disebabkan oleh petugas yang bergumul dengan kebutuhan komunitas dan institusi mereka yang saling bertentangan.

De Maillard dan Roché, 2018 mencatat bahwa perbedaan nasional dan budaya dalam strategi membangun kepercayaan penting untuk dipertimbangkan. Karena itu, orang perlu memahami konteks spesifik negara mereka saat membangun kepercayaan. Ini bisa sulit jika orang menggunakan teori yang luas. Institusi sosial yang dibahas di halaman ini mendapat sedikit perhatian dari para peneliti peradilan pidana sebelumnya. Namun, Tonry (2015) mencatat bahwa generasi ketiga dari pekerjaan peradilan pidana komparatif bergantung pada aspek-aspek yang dianggap sosio-institusional. Oleh karena itu penelitian ini menganggap perlu untuk memahami pentingnya faktor kebangsaan, sejarah dan budaya. Itu juga menunjukkan mengapa mereka relevan untuk mengamati seberapa signifikan mereka. Di Denmark, kepercayaan didefinisikan sebagai hubungan antara negara yang baik hati dan komunitas yang tertata dengan baik. Hubungan ini ada secara alami antara dua orang, dan dapat ditemukan di manapun dalam masyarakat. Karena itu, kepercayaan tidak dapat dipaksakan pada komunitas melalui undang-undang atau kebijakan. Sebaliknya, memahami kepercayaan berasal dari menganalisis konteks historis, budaya, dan sistemik setiap individu. Inggris Raya dan Belanda sama-sama memiliki gagasan yang dianggap mistis atau tertindas. Ide-ide ini masih bermakna bagi publik, tetapi sangat sulit dicapai (Loader dan Mulcahy 2003, De Maillard dan Roché 2018, Schaap 2018). Strategi membangun kepercayaan sangat bervariasi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Ini termasuk konteks nasional; tidak jelas apakah kerusuhan perkotaan di Inggris pada awal 1980-an akan memiliki efek yang sama pada pembangunan kepercayaan di Denmark dan Belanda seperti yang terjadi di Inggris. Dibandingkan dengan Belanda, di mana kritik terbuka terhadap polisi dapat diterima, budaya Denmark kurang menekankan perlawanan dan pembangkangan. Hal ini dapat dilihat melalui kerusakan minimal yang disebabkan oleh kerusuhan Nørrebro di Kopenhagen pada tahun 1993. Alih-alih menjadi krisis kepercayaan yang besar, peristiwa ini dibingkai hanya sebagai bagian dari taktik polisi anti huru hara daripada bukti masalah otoritas yang lebih besar (Schaap 2018).

Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami perbedaan antara negara dan keterlibatan negara dalam sistem kepolisian mereka. Ini termasuk diskusi tentang peran negara dan visi yang saling bertentangan tentang tujuan penegakan hukum. Van Stokkom dan Terpstra (2018) membahas ide-ide ini lebih panjang. Selain itu, perdebatan modern tentang kepercayaan dan kesatuan dalam sistem penegakan hukum dapat ditemukan di berbagai negara. Ide-ide ini dikembangkan berkat beberapa pengaruh Jerman, Prancis, dan Inggris dalam kepolisian (Schaap dan Terpstra 2018). Artikel ini menunjukkan bahwa strategi kepolisian di seluruh dunia seringkali berbeda, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam kebijakan. Salah satu cara untuk memahami hal ini adalah dengan melihat teori sosio-institusional pembangunan sosial. Ini termasuk gagasan bahwa taktik polisi berubah lebih sedikit daripada persepsi publik tentang mereka (De Maillard dan Roché 2018). Cara yang bagus untuk mendapatkan wawasan tentang teori-teori ini adalah dengan membaca karya akademis lainnya. Ini dapat membantu para spesialis memahami bagaimana pendekatan kelembagaan dari berbagai negara dapat bercampur dan berubah. Selain itu, artikel ilmiah harus menyertakan contoh yang terlihat seperti transfer atau difusi kebijakan internasional. Ini dapat menunjukkan kepada pembaca betapa kecilnya dampak proses yang dianggap kuat ini terhadap keadaan saat ini (Tonry 2015, Deephouse 1996). Pendekatan ini mengeksplorasi berbagai strategi membangun kepercayaan di luar ruang lingkup studinya. Kemana hal ini membawa kita? Setiap kali masalah kepercayaan muncul, sulit untuk memprediksi pendekatan apa yang akan diambil oleh sup kebijakan kepolisian kuno. Kepercayaan dibangun antara masyarakat dan polisi melalui dialog. Namun, membangun kepercayaan membutuhkan lebih dari sekadar warga negara yang mempercayai polisi. Hubungan antara masyarakat dan polisi menuntut masyarakat untuk terlibat dalam diskusi kelompok dengan banyak peserta yang berbeda. Ini tidak seperti dialog percakapan tunggal di mana hanya satu peserta yang terlibat dan kedua belah pihak berada di halaman yang sama. Karena kesamaan dengan strategi ini, banyak kesalahan yang dibuat selama membangun kepercayaan. Kesalahan ini sering menyebabkan orang tidak melihat masalah dengan pendekatan atau niat berpikir yang baik padahal sebenarnya tidak. Praktik membangun kepercayaan menggunakan berbagai strategi yang tidak bergantung pada kebijakan tertentu. Strategi-strategi ini tidak bertujuan tunggal atau terkait dengan satu kebijakan, melainkan berorientasi pada tujuan. Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap polisi adalah proses kompleks yang membutuhkan lebih dari satu tombol untuk ditekan. Lembaga kepolisian beroperasi dalam lingkungan kelembagaan dan sosial

yang dinamis. Oleh karena itu, memahami kepercayaan terhadap polisi perlu mempertimbangkan semua aspek kerangka sosial dan kelembagaan yang lebih luas. Ini membutuhkan dukungan dari praktisi polisi dan akademisi. Mempelajari kepercayaan dalam konteks profesional dan politiknya mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana institusi, seperti penegakan hukum, berinteraksi dengan masyarakat yang mudah berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Crank, J. P., & Langworthy, R. (1992). Journal of Criminal Law and Criminology Institutional Perspective on Policing AN INSTITUTIONAL PERSPECTIVE OF POLICING. *J. Crim. L. & Criminology THE JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY*, *83*(2). http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc

de Maillard, J., Hunold, D., Roché, S., & Oberwittler, D. (2018). Different styles of policing: discretionary power in street controls by the public police in France and Germany. *Policing and Society*, *28*(2), 175–188. https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1194837

Goldsmith, A. (2005). Police reform and the problem of trust. *Theoretical Criminology*, *9*(4), 443–470. https://doi.org/10.1177/1362480605057727

Goldsmith, A. J. (1991). Complaints against the Police : A "Community Policing" Perspective. *The Police and the Community in the 1990s.*, 205–218.

Gourley, D. (2015). *Police Relations*. 135–142.

Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., & Murray, K. (2012). Compliance with the law and policing by consent: Notes on police and legal legitimacy. *Legitimacy and Compliance in Criminal Justice*, 29–49. https://doi.org/10.4324/9780203113998

Kingdon, G., & Knight, J. (2007). Unemployment in South Africa, 1995-2003: Causes, problems and policies. *Journal of African Economies*, *16*(5), 813–848. https://doi.org/10.1093/jae/ejm016

Kort, J. (n.d.). *strafrechtspleging*. *77*(1), 6–10.

Lee, M., & McGovern, A. (2013). Force to sell: Policing the image and manufacturing public confidence. *Policing and Society*, *23*(2), 103–124. https://doi.org/10.1080/10439463.2011.647913

Marcelo, J., Institutions, R. De, Ideas, O., Scott, I. D. W. R., Paulo, S., & Scott, D. W. R. (2009). *Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155113814011*.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, *83*(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Reiner, R. (2013). Who governs? Democracy, plutocracy, science and prophecy in policing. *Criminology and Criminal Justice*, *13*(2), 161–180. https://doi.org/10.1177/1748895812474282

Savage, M., & Burrows, R. (2007). The coming crisis of empirical sociology. *Sociology*, *41*(5), 885–899. https://doi.org/10.1177/0038038507080443

Schaap, D., & Scheepers, P. (2014). Comparing Citizens' Trust in the Police Across European Countries: An Assessment of Cross-Country Measurement Equivalence. *International Criminal Justice Review*, *24*(1), 82–98. https://doi.org/10.1177/1057567714524055

Schaap, H., & de Bruijn, E. (2018). Elements affecting the development of professional learning communities in schools. *Learning Environments Research*, *21*(1), 109–134. https://doi.org/10.1007/s10984-017-9244-y

Skogan, W. G. (2009). Concern about crime and confidence in the police: Reassurance or accountability? *Police Quarterly*, *12*(3), 301–318. https://doi.org/10.1177/1098611109339893

Terpstra, J., & Trommel, W. (2009). Police, managerialization and presentational strategies. *Policing*, *32*(1), 128–143. https://doi.org/10.1108/13639510910937157

Tyler, T. R., & Wakslak, C. J. (2004). Profiling and police legitimacy: Procedural justice, attributions of motive, and acceptance of police authority. *Criminology*, *42*(2), 253–282. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00520.x